



Policy Brief

KOMUNIKASI RISIKO YANG INKLUSIF: HAK PENYANDANG DISABILITAS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN SELAMA MASA PANDEMI



www.onehealth.or.id



Ringkasan Eksekutif

Upaya komunikasi risiko yang lebih inklusif diperlukan untuk mengakomodasikan kebutuhan akses informasi terkait COVID-19 oleh penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, penelitian kualitatif ini menggarisbawahi pentingnya memahami keberagaman kemampuan dan latar belakang sosial-ekonomi yang mempengaruhi aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap informasi dan teknologi.

Pendahuluan

Penyandang disabilitas menghadapi tantangan tersendiri dalam mengakses komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait upaya pencegahan COVID-19 dan risiko terhadap dampak ekonomi dan sosial. Menurut Salim dan Yulianto, sebuah survei yang dilakukan pada 1.683 penyandang disabilitas pada bulan Mei dan Juni 2020 menunjukkan bahwa media komunikasi yang tersedia belum cukup aksesibel bagi hampir 60% responden dengan disabilitas sensorik¹.

Informasi terkait pencegahan dan risiko diperlukan untuk mendorong diadopsinya protokol kesehatan untuk mengurangi laju penyebaran COVID-19. Studi mengenai pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa penyandang disabilitas mengalami tantangan dalam mengakses layanan kesehatan dan informasi tentang bantuan selama pandemi COVID-19². Sementara itu, akses informasi dan teknologi digital justru berpeluang membuka kesempatan ekonomi yang lebih besar bagi penyandang disabilitas². Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan upaya komunikasi risiko bagi penyandang disabilitas agar tercipta pemerataan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penyandang disabilitas usia dewasa (18-59 tahun) kedua tertinggi di Indonesia³.

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melakukan 4 diskusi kelompok terarah yang melibatkan 5 penyandang disabilitas netra (4 perempuan, 1 laki-laki), 10 penyandang disabilitas mobilitas (6 laki-laki, 4 perempuan) dan 9 penyandang disabilitas tuli (4 laki-laki, 5 perempuan) dari Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Diskusi antara informan laki-laki dan perempuan dilakukan secara terpisah untuk menjamin kenyamanan informan dalam bertukar informasi. Setiap diskusi difasilitasi oleh dua juru bahasa isyarat (JBI).

Hasil dan Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengidentifikasi tantangan-tantangan terkait komunikasi risiko pada penyandang disabilitas di Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut.

1. Informasi yang diterima oleh penyandang disabilitas tidak lengkap

Seringkali, pesan yang diterima oleh penyandang disabilitas terlalu singkat dan tidak mendalam. Informan dalam penelitian ini mengutarakan bahwa mereka memerlukan lebih banyak informasi tentang vaksin *booster*, efek samping dari setiap merk vaksin, pengobatan COVID-19, jadwal vaksinasi, dan *update* jumlah kasus.

¹ Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas.

² Millott, M., & Wulandari, F. T. (2021). Disabilitas-pembangunan inklusif di Sulawesi Selatan. Melbourne. Diakses dari <https://pair.australiaindonesiacentre.org/wp-content/uploads/2021/02/PAIR-backgrounder-01-2021-Bahasa.pdf>

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018.



2. Informasi yang dapat diakses penyandang disabilitas masih terbatas

Keragaman kemampuan dan aksesibilitas pada penyandang disabilitas seringkali luput dalam perancangan dan pelaksanaan strategi komunikasi risiko COVID-19. Misalnya, penyandang disabilitas netra yang tinggal di pedesaan tidak selalu memiliki *smartphone*, sehingga lebih fasih berkomunikasi via suara atau komunikasi tatap muka dibandingkan komunikasi visual melalui materi bergambar di media sosial. Penyandang disabilitas tuli yang juga memiliki kerentanan ganda secara geografis maupun sosial-ekonomi juga cenderung lebih fasih berkomunikasi dengan gestur tubuh natural atau bahasa ibu, alih-alih bahasa isyarat Indonesia (BISINDO). Hal ini menunjukkan pentingnya pembuatan media komunikasi dalam berbagai bentuk, sehingga komunikasi risiko menjadi aksesibel bagi semua orang dari berbagai kemampuan dan latar belakang.

3. Penyandang disabilitas, terutama perempuan, lebih rentan terpapar misinformasi terkait COVID-19

Penyandang disabilitas perempuan cenderung lebih banyak melaporkan misinformasi terkait COVID-19 dibandingkan penyandang disabilitas laki-laki. Konten misinformasi yang dilaporkan penyandang disabilitas perempuan pun lebih beragam, misalnya bahwa substansi herbal mampu mengobati COVID-19. Kendati demikian, upaya validasi misinformasi juga lebih banyak dilakukan oleh informan penyandang disabilitas perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelurusan misinformasi pada penyandang disabilitas harus mempertimbangkan juga aspek gender.

4. Terdapat keragaman upaya penyandang disabilitas untuk melakukan validasi informasi seputar COVID-19

Di Provinsi Sulawesi Selatan, kami mengamati bahwa upaya validasi misinformasi, misalnya melalui pencarian di internet atau bertanya kepada keluarga/dokter, lebih banyak dilakukan oleh penyandang disabilitas tuli dan mobilitas. Penyandang disabilitas netra, terutama yang tinggal di wilayah atau rumah tangga dengan kerentanan geografis, ekonomi, dan sosial, memiliki kecenderungan yang lebih kecil untuk melakukan validasi informasi terkait COVID-19. Hal ini salah satunya terkait dengan preferensi kanal komunikasi yang berbeda-beda di antara berbagai penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tuli dan mobilitas memiliki perilaku digital yang lebih intens, dengan *platform* media sosial (misalnya Facebook dan Instagram) serta pesan instan (misalnya WhatsApp) sebagai salah satu sumber utama informasi COVID-19. Penyandang disabilitas netra mendapatkan informasi terkait COVID-19 lebih banyak melalui komunikasi tatap muka atau via panggilan telepon, sehingga jangkauan informasinya menjadi lebih terbatas.

5. Kurangnya keterwakilan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan maupun penyajian komunikasi risiko COVID-19

Penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan merasa masih kurang dilibatkan dan terwakili dalam penyusunan maupun pelaksanaan komunikasi risiko COVID-19. Isu-isu penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut keragaman kemampuan, melainkan juga isu spesifik terkait budaya, kondisi geografis, gender, tatanan sosial-ekonomi, dan kebijakan di tingkat lokal. Jika isu-isu ini tidak dicakup dalam upaya komunikasi risiko COVID-19, penyandang disabilitas berisiko menjadi semakin “terpinggirkan” dalam upaya pengentasan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.



Pilihan Kebijakan

Peningkatan upaya komunikasi risiko bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilakukan dengan menciptakan strategi komunikasi yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang gender, kemampuan, sosial-ekonomi, dan geografis melalui beberapa pilihan berikut.

1. Komunikasi risiko untuk penyandang disabilitas netra

Penyandang disabilitas netra mengandalkan komunikasi dengan suara. Penyandang disabilitas netra kerap memanfaatkan fitur *TalkBack* pada *smartphone* untuk mengakses informasi. Oleh karena itu, media komunikasi risiko digital dapat dilengkapi dengan fitur suara dan teks yang mendeskripsikan konten komunikasi secara lengkap, sehingga dapat diakses melalui fitur 'TalkBack'. Media komunikasi tercetak dapat juga dibuat menggunakan aksara Braille. Penjangkauan secara tatap muka maupun melalui keluarga/pendamping juga penting bagi penyandang disabilitas netra yang memiliki kerentanan geografis, sosial, dan ekonomi.

2. Komunikasi risiko untuk penyandang disabilitas tuli

Penyampaian komunikasi risiko bagi penyandang disabilitas tuli yang tidak menggunakan BISINDO dapat dilakukan melalui keluarga/pendampingnya secara tatap muka. Terkait komunikasi digital, konten komunikasi yang berbentuk video sebaiknya dilengkapi juga dengan terjemahan oleh JBI dengan ukuran video yang cukup terlihat dan teks dengan *typfont* yang sederhana (seperti jenis font *sans serif*). Penyampaian komunikasi bagi penyandang disabilitas tuli dapat dilakukan melalui akun-akun resmi pemerintah, mengingat banyak penyandang disabilitas tuli yang merujuk pada akun media sosial (Facebook dan Instagram) resmi pemerintah untuk mengakses informasi terkait COVID-19. Selain itu, penyandang disabilitas tuli perempuan mempercayai informasi yang disampaikan oleh tokoh pemimpin perempuan. Hal ini menunjukkan pentingnya keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam penyampaian komunikasi risiko bagi penyandang disabilitas.

3. Komunikasi risiko untuk penyandang disabilitas mobilitas

Penyampaian informasi dalam bentuk digital dapat meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas mobilitas pada informasi COVID-19. Namun, penyandang disabilitas mobilitas seringkali memiliki kerentanan secara sosial-ekonomi yang membatasi kesempatan dalam mengakses informasi COVID-19. Keanggotaan dalam Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) lokal dapat memperluas jejaring dan aksesibilitas informasi pada penyandang disabilitas mobilitas. Terkait dengan komunikasi risiko massal secara tatap muka, penyelenggaraannya perlu dilakukan di lokasi yang mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas mobilitas, misalnya di lantai dasar, atau dari rumah ke rumah.

4. Komunikasi risiko untuk keluarga dan pendamping

Untuk menguatkan komunikasi risiko kepada penyandang disabilitas, keluarga dan pendamping perlu dilibatkan dalam penyampaian informasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga tantangan dan kerentanan yang dimiliki keluarga/pendamping. Keluarga dan / atau pendamping yang memiliki kerentanan secara geografis, ekonomi, dan sosial perlu pendekatan melalui komunikasi tatap muka dengan pilihan kata yang lebih sederhana. Penjangkauan keluarga dan pendamping juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas lokal untuk lebih memahami isu spesifik yang dialami penyandang disabilitas beserta keluarga/pendampingnya.



Rekomendasi

1. Penyampaian komunikasi risiko dapat dilakukan melalui media sosial, pertemuan tatap muka, maupun melalui keluarga dan pendamping untuk menjangkau penyandang disabilitas dari berbagai kalangan.
2. Menyajikan substansi komunikasi yang lebih lengkap dan menjawab kekhawatiran dari penyandang disabilitas. Konten-konten yang masih diperlukan meliputi konten tentang vaksin *booster*, efek samping dari setiap merk vaksin, pengobatan COVID-19, jadwal vaksinasi, dan update jumlah kasus.
3. Kerja sama antara pemerintah daerah dengan organisasi penyandang disabilitas lokal untuk menyusun strategi dan melaksanakan komunikasi risiko COVID-19 yang ditujukan kepada penyandang disabilitas.
4. Peningkatan kapasitas petugas di garda depan, seperti petugas vaksinasi dan edukator lapangan, dalam mengkomunikasikan risiko seputar COVID-19 bagi penyandang disabilitas.

Policy Brief ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang didanai oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP). Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu mencerminkan pandangan AIHSP. Pemerintah Australia tidak mengabsahkan pandangan dalam publikasi ini maupun menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi yang terkandung dalam publikasi ini.

Informasi Lebih Lanjut

Kemitraan Australia Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP)

International Financial Centre (IFC), Tower 2, Level 18, Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23 Jakarta 12920

Website: www.onehealth.or.id

E-mail: info@aihsp.or.id